

# PERESMIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

Pendopo Wahyawibawagraha

Senin, 02 Oktober 2023

JEMBER Kuarent!



## LAPORAN KINERJA (LAKIP) BAGIAN HUKUM TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023.

Januari 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBER

  
A. ZAENURROFIK, SH

Panata Tingkat I

NIP. 19810529 201101 1 004

## DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	....
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	....
A. RENCANA STRATEGIS .....	....
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	....
C. PERJANJIAN KINERJA .....	....
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	....
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	....
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	....
BAB IV. PENUTUP. ....	....
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Hukum disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Hukum tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD;
2. Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu; dan
3. Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh Masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Hukum tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Hukum telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 10 (sepuluh) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, 1 (satu) indikator capaiannya **Cukup**, dan 1 (satu) capaian dalam kategori **Kurang**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **89,47 %** merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp3.504.759.000 dan Belanja Modal sebesar Rp50.000.000.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.225.483.716 atau 89,48 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dan pergeseran anggaran dalam penggunaan untuk pencapaian kinerja yang disebabkan tambahan kegiatan mengikuti kebijakan prioritas Kepala Daerah dalam pengembangan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Jember tahun anggaran 2023.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Masih kurangnya personil yang mumpuni dalam mengakomodir semua kegiatan teknis yang ada, terutama dibidang penyusunan produk hukum dan pendokumentasian produk hukum.
2. Keterbatasan anggaran serta penambahan kegiatan mengikuti kebijakan pimpinan mengharuskan pergeseran anggaran dari kegiatan yang skala prioritasnya kurang ke kegiatan yang skala prioritasnya lebih dibutuhkan.
3. Belum adanya kegiatan pelatihan atau peningkatan kemampuan kinerja seperti Bimtek ataupun uji kompetensi yang rutin pada personil bagian hukum terkait teknis kegiatan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Dapat dipenuhinya personil pada setiap jabatan yang masih kosong disesuaikan dengan Analisa Jabatan dan Kebutuhan Jabatan pada Bagian Hukum.
2. Kecukupan anggaran disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang sudah ditentukan pada Renstra serta menambah anggaran apabila terdapat tambahan kegiatan baru yang harus dilaksanakan.
3. Perlu adanya Pelatihan atau Bimbingan Teknis serta Uji Kompetensi rutin sebagai pengukur standart minimal kinerja pada Bagian Hukum Kabupaten Jember.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah tahun 2023.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2023 sebagai berikut :

### **1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023**

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  - 1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
  - a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari
    - a. Sub Bagian Protokol; dan
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Bagian Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## **2) Tugas , Fungsi, kedudukan Bagian Hukum :**

- Bagian Hukum merupakan unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
- Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Bagian Hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- e. penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;
- f. pengkajian perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- g. penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparatur perangkat daerah, perangkat desa dan masyarakat;
- i. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah;
- j. pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hukum baik secara litigasi dan non litigasi;
- k. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
- l. penyusunan program legislasi daerah;
- m. pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEMBER**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember terdiri dari 7 (tujuh) ASN dan 7 (tujuh) Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Bagian Hukum**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari - Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kepala Bagian	1	
2	Analisis Hukum Ahli Muda	1	
3	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	1	
4	Penyusun Peraturan Perundang-undangan	2	

5	Pengadministrasi Perkantoran	2	
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Bagian Hukum**  
**berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**  
**periode Januari - Desember 2023**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Tingkat I	III/d	3
2	Penata	III/c	1
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
4	Penata Muda	III/a	-
5	Pengatur Tingkat I	II/d	1
6	Pengatur	II/c	2
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
8	Pengatur Muda	II/a	-
9	Juru Tingkat I	I/d	-
10	Juru	I/c	-
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Bagian Hukum**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	4	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	3	ASN
6	S2	-	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	4	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	3	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	

## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember, yaitu:

1. Harmonisasi produk;
2. Peningkatan Pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan aparatur pemerintah; dan
3. Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk hukum daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Setda Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 3 yaitu

- 1) Misi ke-2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- 2) Tujuan ke-3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten : Meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Sasaran Strategis Perangkat daerah (Sekretariat Daerah) :  
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Setda Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS SETDA KABUPATEN  
JEMBER TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan.

Indikator Tujuan : Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>							
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100 %	673	675	676	678	680
Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum	Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	100 %	113	114	115	116	117
Persentase jumlah produk hukum yang sudah diupload di JDIH	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat	100 %	600	610	615	620	625
<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>							
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun			100 %	100 %	100 %	100 %

Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi (non ASN)			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya			100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi			100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber data : tabel 4.1 pada Rencana Strategis Perubahan Setda Kabupaten Jember tahun 2021-2026

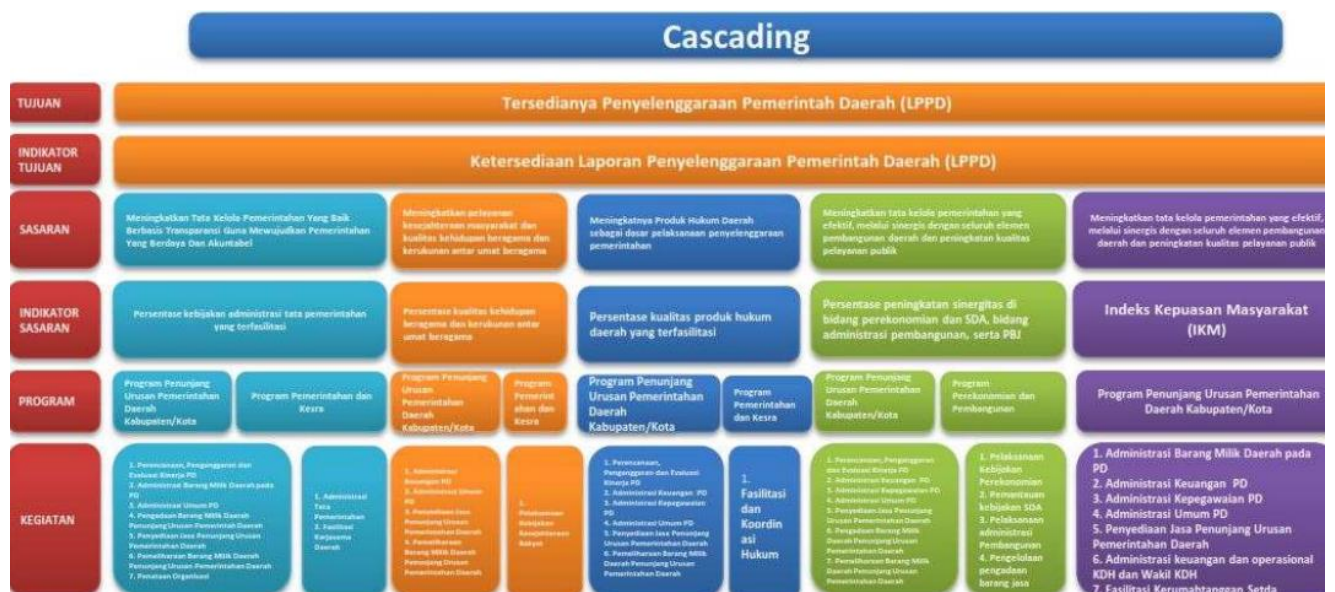
## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah sebagaimana terlampir berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Nomor 0651/1/HK/1.12/2023;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD	Bagian Hukum Setda Kab Jember	- Register Perda - Register Perbup - Register SK - Daftar Penerima Bantuan Hukum
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Kegiatan pada setiap PPTK		- Daftar Perkara - Website JDIIH
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya ketersediaan pakaian dinas dan pakaian olahraga kantor		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kebersihan dan peralatan perkantoran yang dapat selalu dipakai		
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi (non ASN)	Terpenuhinya kegiatan surat menyurat, perlengkapan Telpon, listrik dan Penunjang Administrasi Perkantoran		

Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	Terpenuhinya peralatan kendaraan dinas siap pakai		
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi	Terselenggaranya penyusunan produk hukum		
		Terselesainya fasilitasi bantuan hukum		
		Tercapainya pendokumentasian produk hukum		

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada Perjanjian Kinerja Bagian Hukum tahun 2023, target yang dicantumkan terdapat perubahan dibandingkan target yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 disebabkan karena beberapa kondisi strategis antara lain:

1. Adanya program dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang memiliki Keluarga Sadar Hukum;
2. Target Kepala Daerah untuk meningkatkan Keluarga Sadar Hukum menjadi salah satu prioritas dalam perubahan Renstra;
3. Sehubungan dengan pergeseran skala prioritas kegiatan, selanjutnya kebijakan pimpinan mengubah indikator kinerja Sosialisasi Produk Hukum menjadi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dengan target akhir tahun 2023 sebanyak 57 Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Terdapat 7 sasaran strategis Bagian Hukum yang dirumuskan dari sasaran kegiatan yang diampu oleh Bagian Hukum dalam mendukung sasaran strategis Sekretariat daerah, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Administrasi KepegawaiN (pakaian dinas beserta perlengkapannya)	100%
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	100%
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi /non ASN)	100%
6	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%
7	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember didukung dengan anggaran program P-APBD tahun 2023 sebesar Rp 3.604.759.000,00 (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEMBER**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	0%	0%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Administrasi KepegawaiN (pakaian dinas beserta perlengkapannya)	100%	100%	100%
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi /non ASN)	100%	100%	100%
6	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Produk Hukum	1 Persentasi Perda yang diusulkan ke DPRD	10	6	60%

Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	2	Persentasi Perbup yang diundangkan	70	60	90 %
	3	Persentasi SK yang ditetapkan	550	607	100 %
	4	Jumlah Penyelesaian Permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	8	113	100 %
	5	Jumlah bantuan hukum bagi Masyarakat miskin	150	140	95 %
	6	Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses oleh masyarakat	600	326	53 %
	7	Jumlah penyuluhan hukum	6	12	100 %
	8	Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	57	57	100 %

*Sumber Data: Data kinerja sasaran kegiatan Bagian hukum tahun 2023 dan Data pendukung lainnya.*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 7 (tujuh) indikator sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember rata rata mencapai 90 % dan masuk dalam kategori **Memuaskan**. Dengan demikian maka secara umum Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pendukung Urusan Pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Setda Kabupaten Jember tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023**  
**dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR SASARAN (2)	TARGET			REALISASI		
		2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	-	100%	100%	-	100%	0%
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	-	100%	100%	-	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Administrasi KepegawaiN (pakaian dinas beserta perlengkapannya)	-	100%	100%	-	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	-	100%	100%	-	100%	100%
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi /non ASN)	-	100%	100%	-	100%	100%
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	-	100%	100%	-	100%	100%
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentasi Perda yang diusulkan ke DPRD	-	10	10	-	5	6
	Persentasi Perbup yang diundangkan	-	70	70	-	45	60
	Persentasi SK yang ditetapkan	-	550	550	-	595	607
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	-	6	8	-	6	113

Jumlah bantuan hukum bagi Masyarakat miskin	-	100	150	-	100	140
Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses oleh masyarakat	-	560	12	-	560	12
Jumlah penyuluhan hukum	-	6	6	-	6	12
Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	-	-	57	-	-	57

*Sumber Data: Data kinerja sasaran kegiatan Bagian hukum tahun 2023*

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023**  
**berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENCANA STRATEGIS 2021-2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	0%	0%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian (pakaian dinas beserta perlengkapannya)	100%	100%	100%
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpin dan Jasa Tenaga Administrasi)	100%	100%	100%

6	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentasi Perda yang diusulkan ke DPRD	10	6	60 %
		Persentasi Perbup yang diundangkan	70	60	90 %
		Persentasi SK yang ditetapkan	550	607	100 %
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	8	113	100 %
		Jumlah bantuan hukum bagi Masyarakat miskin	150	140	95 %
		Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses oleh masyarakat	600	326	53 %
		Jumlah penyuluhan hukum	6	12	100 %
		Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	-	57	100 %

*Sumber Data: Data kinerja sasaran kegiatan Bagian hukum tahun 2023*

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	0%		
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%		
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Adminisrasi KepegawaiN (pakaian dinas beserta perlengkapannya)	100%		

4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	100%		
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi /non ASN)	100%		
6	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%		
7	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentasi Perda yang diusulkan ke DPRD	6		
		Persentasi Perbup yang diundangkan	60		
		Persentasi SK yang ditetapkan	607		
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	113		
		Jumlah bantuan hukum bagi Masyarakat miskin	140		
		Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses oleh masyarakat	326		
		Jumlah penyuluhan hukum	12		
		Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	57		

*Sumber Data: Data kinerja sasaran kegiatan Bagian hukum tahun 2023 dan data realisasi nasional*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum dengan terpenuhinya dokumen RKA, DPA, Perubahan RKA dan Perubahan DPA-SKPD.

- Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum.
- Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum
- Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum
- Sasaran Strategis 5: Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum
- Sasaran Strategis 6: Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum
- Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

### **Sasaran Strategis 1-6 :**

Merupakan kegiatan rutin penunjang administrasi pemerintahan yang terdiri dari honor pejabat pengelola keuangan, Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi (non ASN), pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran.

Pada Sasaran Strategis 1 realisasi 0% dikarenakan sudah tidak direalisasikan honorarium Tim pembuat Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi.

### **Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan**

Capaian sasaran kegiatan utama sebagai sasaran strategis Bagian Hukum termasuk dalam kategori capaian Memuaskan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang ditemukan dan direncanakan perbaikannya kedepan adalah :

- a. banyaknya raperda dan raperbup yang akan dibuat tidak ditunjang dengan pemenuhan SDM yang seimbang yang berakibat pimpinan mengambil kebijakan untuk membuat skala prioritas pada raperda dan raperbup yang akan ditetapkan.

Terkait kendala / permasalahan tersebut, maka sebagai solusi Bagian Hukum merencanakan untuk pengajuan permohonan penambahan personil sebagai salah satu cara sebagai pemerataan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi tiap personil dilihat berdasarkan analisa beban kerjanya.

- b. Regulasi tahapan pembentukan produk hukum daerah yang mengharuskan melewati proses Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Timur dan Fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang cukup memakan waktu lebih lama dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Terkait kendala / permasalahan tersebut, maka sebagai solusi Bagian Hukum merencanakan untuk meningkatkan koordinasi lebih intensif kepada Instansi Pembina dan Provinsi serta membuat kebijakan-kebijakan baru yang bisa membantu dalam mempercepat proses pembentukan Produk Hukum Daerah.

- c. Dalam pembentukan Perda terdapat pada Tim Propemperda dan Bapemperda DPRD fokus terhadap 3 (tiga) Raperda prioritas yaitu Raperda Penyertaan Modal PDP Kahyangan yang harus diundangkan sebelum ditetapkan APBD 2024, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan *deadline* sebelum tanggal 5 Januari 2024 dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang mengakibatkan beberapa Raperda tidak mendapatkan jadwal pembahasan dan akan dilanjutkan pada Propemperda 2024.

Terkait kendala / permasalahan tersebut, maka sebagai solusi Bagian Hukum merencanakan untuk lebih teliti dalam menentukan prioritas dalam menerima dan mengusulkan Raperda ke DPRD berdasarkan pertimbangan visi dan misi Kepala Daerah atau juga berdasarkan perintah langsung dari aturan Pemerintah Pusat.

- d. Meningkatnya Jumlah gugatan perkara GS (gugatan sederhana) sehingga mengharuskan penambahan anggaran dan peningkatan realisasi terkait kegiatan tersebut. Terkait kendala / permasalahan tersebut, maka sebagai solusi Bagian Hukum merencanakan untuk mengajukan permohonan penambahan anggaran penyelesaian perkara.
- e. Adanya perubahan subkegiatan antara Perjanjian Kerja dan Indek Kinerja Utama berdasarkan Perubahan Renstra pada pertengahan tahun 2023 pada subkegiatan Sosialisasi Produk Hukum dirubah menjadi Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum berdasarkan kebijakan Kepala Daerah.

Terkait kendala / permasalahan tersebut , maka sebagai solusi Bagian Hukum merencanakan untuk mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan yang tidak dapat terealisasi ke kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1								
Indikator	0 %							
Rata rata capaian	0 %							
Sasaran 2								
Indikator	100 %							
Rata rata capaian	100 %							
Sasaran 3								
Indikator	100 %							
Rata rata capaian	100 %							
Sasaran 4								
Indikator	100 %							
Rata rata capaian	100 %							
Sasaran 5								
Indikator	100 %							
Rata rata capaian	100 %							
Sasaran 6								
Indikator	100 %							
Rata rata capaian	100 %							
Sasaran 7								
Indikator 1.1	73 %							

Indikator 1.2	94 %							
Indikator 1.3	72 %							

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam kategori **Memuaskan**.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember pada tahun 2023 didukung 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**  
**tahun 2023**

Sasaran Strategis : Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum			
Input : Usulan Permohonan pembentukan produk hukum dari PD Dana / Anggaran	10 Perda 70 Perbup 550 SK Rp.149.239.100	12 Perda 70 Perbup 617 SK Rp.109.807.950	73,58 %
Output : Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi penetapan dan pengundangannya sesuai ketentuan	10 Perda 70 Perbup 550 SK	6 Perda 60 Perbup 607 SK	106,8%

Outcome : Persentase terselenggaranya Penyusunan produk hukum daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%
---	------	------	------



PROSES PEMBAHASAN DAN HARMONISASI SALAH SATU RAPERDA DI KANWILKUMHAM JATIM



Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Bantuan Hukum

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum			
Input : Surat Permohonan pemberian bantuan hukum Dana / Anggaran	140 Permohonan Rp.2.208.478.000	140 Permohonan Rp.2.08.126.100	94,46%

Output : Jumlah pemberian bantuan hukum yang terlaksana sesuai ketentuan dan tepat sasaran	140 permohonan	140 permohonan	100%
Outcome : terselenggaranya pemberian bantuan hukum tepat waktu dan tepat sasaran			



Sub Kegiatan 3 : Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Sub Kegiatan : Pendokumentasian produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum			
Input : Dana / anggaran	Rp.121.000.000	Rp.88.095.630	72,81%
Output : jumlah kegiatan pemberian informasi hukum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	663 kegiatan (600 Dok upload 6 Penyuluhan 57 Kadar hukum)	395 kegiatan (326 Dok upload 12 Penyuluhan 57 Kadar hk)	59,6%
Outcome : % terselenggaranya pemberian informasi hukum sesuai ketentuan	100%		90 %





#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

**Tabel 3.7**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	95 %	73,58 %	Efisien/ Tidak Efisien (* Pilih salah satu)
Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %	94,46 %	Efisien/ Tidak Efisien (* Pilih salah satu)
Pendokumentasian produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	90 %	72,81 %	Efisien/ Tidak Efisien (* Pilih salah satu)

Sumberdaya Manusia Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember berjumlah 14 orang dengan rincian 1 pejabat struktural, 1 analis hukum ahli muda, 5 pelaksana PNS dan 7 Non PNS.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendukung Urusan Pemerintahan didukung anggaran sebesar Rp. 3.604.759.000 dan terserap sebesar Rp. 3.225.483.716.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dengan rata- rata capaian **89,48 %**

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.554.759.000 serta ditambah lagi pada Perubahan APBD sebesar Rp.50.000.000 menjadi Rp.3.604.759.000 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional sebesar Rp3.504.759.000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp50.000.000,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan Bagian Hukum dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
<b>I.</b>	<b>Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>			
1	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	149.239.100	109.807.950	73,58

	Sub Kegiatan : Fasilitas Bantuan Hukum	2.208.478.000	2.08.126.100	94,46
	Sub Kegiatan : Pendokumentasian produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	121.000.000	88.095.630	72,81
<b>II.</b>	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	114.600.000	114.600.000	100
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Beserta Atribut kelengkapannya	45.400.000	41.650.000	91,74
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BM).	50.000.000	45.000.000	90
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.999.900	12.080.500	80,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	267.787.800	224.730.025	83,92

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.900.000	4.908.500	55,15
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	354.582.000	254.644.802	71,82
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	5.250.000	4.350.000	82,86
	Sub Kegiatan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.400.000	688.209	49,16
	Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor	223.122.200	209.342.000	93,82
6	Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	29.460.000	73,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.3.604.759.000</b>	<b>Rp.3.225.483.716</b>	<b>89,48</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember pada tahun 2023 sebesar **Rp. 3.180.483.716,00** dari total anggaran **Rp. 3.554.759.000,00** atau **89,47 %**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 makamengalami kenaikan sebesar 9,78 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar **Rp.3.600.780.552,00** terealisasi sebesar **Rp.2.869.312.410,00** atau 79,69 %. Kenaikan ini disebabkan karena adanya beberapa tambahan kegiatan prioritas antara lain Pentetapan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan Ham dan lomba Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Bagian Hukum. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bagian Hukum 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bagian Hukum pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Hukum dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **sangat baik** karena dari 12 (dua belas) indikator sasaran sebanyak 4 (empat) indikator pencapaiannya dalam kategori memuaskan, 5 (lima) indikator dalam kategori sangat baik, 1 (satu) indikator dalam kategori cukup dan 1 (satu) indikator dalam kategori Kurang.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar **Rp.3.554.759.000,00** atau **89,47 %**, sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan tidak ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

#### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Hukum masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya personil yang mumpuni dalam mengakomodir semua kegiatan teknis yang ada, terutama dibidang penyusunan produk hukum dan pendokumentasian produk hukum.
2. Keterbatasan anggaran serta penambahan kegiatan mengikuti kebijakan pimpinan mengharuskan pergeseran anggaran dari kegiatan yang skala prioritasnya kurang ke kegiatan yang skala prioritasnya lebih dibutuhkan.
3. Belum adanya kegiatan pelatihan atau peningkatan kemampuan kinerja seperti Bimtek ataupun uji kompetensi yang rutin pada personil bagian hukum terkait teknis kegiatan.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya antara lain :

1. Dapat dipenuhinya personil pada setiap jabatan yang masih kosong disesuaikan dengan Analisa Jabatan dan Kebutuhan Jabatan pada Bagian Hukum.
2. Kecukupan anggaran disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang sudah ditentukan pada Renstra serta menambah anggaran apabila terdapat tambahan kegiatan baru yang harus dilaksanakan.
3. Perlu adanya Pelatihan atau Bimbingan Teknis serta Uji Kompetensi rutin sebagai pengukur standart minimal kinerja pada Bagian Hukum Kabupaten Jember.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Hukum yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

## RENCANA STRATEGIS BAGIAN HUKUM

### Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	1. Meningkatkan Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diundangkan	100 %	673	675	676	678	680	Persentasi Perda yang diusulkan ke DPRD	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
											Persentasi Perbup yang diundangkan		
											Persentasi SK yang ditetapkan		
			2. Meningkatkan pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum	Perkara yang dapat diselesaikan , Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	100 %	113	114	115	116	117	Jumlah Penyelesaian Permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum	
											Jumlah bantuan hukum bagi Masyarakat miskin		





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 424044 JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS BUDIARTO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 1 Februari 2023  
Pihak Pertama  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
  
**AGUS BUDIARTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19690828 199503 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BAGIAN HUKUM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan	1. Peraturan Daerah yang dihasilkan	10 Perda
		2. Peraturan Bupati yang dihasilkan	70 Perbup
		3. Keputusan Bupati yang dihasilkan	550 Keppup
2.	Meningkatnya Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	1. Jumlah penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	8 perkara
		2. Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin	150 bantuan
3.	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	1. Jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat	600 Dokumen
		2. Jumlah Penyuluhan Hukum	6 kali
		3. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	4 kali

- Program
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Jumlah

Anggaran	Keterangan
Rp. 1.289.012.200	APBD 2023
Rp. 3.031.812.600	APBD 2023
Rp. 4.320.824.800	



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 1 Februari 2023  
Pihak Pertama  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**AGUS BUDIARTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19690828 199503 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 424044 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2023**

**RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan transparan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, tercapainya kondisi masyarakat yang aman dan damai, rendah konflik serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan ke DPRD
				Persentase Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan
				Persentase Keputusan Bupati yang dihasilkan

**RKT**

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Terciptanya Situasi Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tertib, Nyaman dan	Jumlah produk hukum daerah	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	a. Peraturan Daerah yang dihasilkan	10 Perda	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Produk Hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan, Persoalan hukum yang	10 Perda	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diusulkan ke Dewan Jumlah Peraturan Bupati	10 Perda	Rp. 3.031.812.600
			b. Peraturan Bupati yang dihasilkan	70 Perbup			70 Perbup			70 Perbu	
			c. Keputusan Bupati yang		Fasilitasi dan						

Berkeadilan			dihasilkan	550 Kepbu p	Koordinasi Hukum	dapat terselesaikan	550 Kepbu p		yang dihasilkan Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan	p  550 Kepbu p	
	Pelayanan dan bantuan hukum	Meningkatnya Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dlm Hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin	a. Jumlah penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	8 perkar a	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>  Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		8 perkar a	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara/Pe nyelesaian permasala han hukum yang terselesaik an	8 perkar a	
			b. Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin	150 bantua n			150 bantua n		Jumlah Bankum miskin yang diberikan	150 bantua n	
	Jumlah produk hukum yang terupload	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	a. Jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat	600 dokum en	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>  Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		600 dokum en	Pendoku mentasian Produk Hukum dan Pengelola an Informasi Hukum	Persentas e produk hukum yang dapat diakses oleh masyaraka t	600 dokum en	
			b. Jumlah Penyuluhan Hukum	6 kali			6 kali	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penyuluha n Hukum	6 kali	

			c. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	4 kali			4 kali	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah sosialisasi produk hukum	4 kali	
					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Kebutuhan Pegawai tercukupi	7 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD	Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP	7 Dokumen	Rp. 29.136.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Jumlah Kebutuhan Pegawai yang terpenuhi	100 persen	Rp. 425.208.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 persen	Rp. 39.200.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	penyediaan Peralatan dan Perlengka	Terpenuhinya sarana dan prasarana	100 persen	Rp. 600.916.200

							pan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kantor serta rapat-rapat konsultasi ke luar daerah		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan	Terpenuhi nya jasa surat menyurat, jasa telepon dan jasa tenaga administrasi (non ASN)	100 persen	Rp. 154.552.000

								n Jasa Pelayanan Umum Kantor			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100 persen	Rp. 40.000.000

Jember, 1 Februari 2023

Pihak Pertama

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AGUS BUDIARTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19890828 199503 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN SUDARMAN NO. 1 TELP. (0331) – 424044 JEMBER 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 065/ 1 / HK /1.12/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tersebut dalam lampiran.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertujuan untuk :
- (1) memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - (2) mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam :
- a. perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
  - e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AGUS BUDIARTO, S.H., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19690828 199503 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**

- Instansi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi dan urusan pemerintahan bidang penunjang serta tugas pembantuan.
- Fungsi :  
a. Pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah;  
b. Penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum Kabupaten berupa regulasi maupun legislasi Kabupaten;  
c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Penyelenggaraan Pemerintah;  
d. Penyiapan telaah bahan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum Kabupaten maupun Produk Hukum Kabupaten terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;  
e. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Jember.
- Indikator Tujuan :  
a. Jumlah Produk Hukum Daerah;  
b. Pelayanan dan Bantuan Hukum;  
c. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum;

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Perda yang diusulkan ke DPRD;</li> <li>2. Peraturan Bupati yang dihasilkan;</li> <li>3. Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan.</li> </ol>	Jumlah OPD yang mengajukan penerbitan Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.	OPD di Pemerintah Kabupaten Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
Meningkatnya Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan;</li> <li>2. Prosentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin</li> </ol>	Jumlah perkara yang terfasilitasi serta jumlah bantuan hukum masyarakat miskin yang diberikan	OBH yang terakreditasi di Kabupaten Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Penyuluhan Hukum;</li> <li>2. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah;</li> <li>3. Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum.</li> </ol>	Jumlah Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember